

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Secara geografis, Indonesia dan Vietnam berdekatan, sehingga bergabung dengan keanggotaan RPOA-IUU sebagai bagian dari tahap kerjasama dalam memerangi penangkapan ikan ilegal yang terjadi secara legal di perairan Indonesia menjalin kerjasama sektor perikanan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam memerangi kejahatan IUU fishing lintas batas terus meningkat berkat upaya mereka untuk mengatasi masalah tersebut. sangat baik. Tentang peran aktif Indonesia dan Vietnam dalam memerangi *Illegal Fishing*, atau penyelenggaraan patroli bersama di masing-masing wilayah, yang terkonsentrasi di perairan Indonesia yang berpotensi terjadi perburuan liar. Hal ini terutama terlihat dari tingkat pelanggaran IUU oleh kapal Vietnam Indonesia yang terus menurun dari tahun ke tahun. Keberhasilan kerja sama Indonesia dengan Vietnam dalam mengatasi IUU fishing tentunya didukung oleh beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Indonesia bekerjasama dengan Vietnam dalam mengatasi masalah ini..

Di keberhasilan ini, adanya suatu masalah dengan penyelesaian ZEE lintas batas antara Indonesia dan Vietnam yang sampai sekarang penulis menulis skripsi ini masih belum selesai. Pemerintah Indonesia sendiri akan terus berupaya menegakkan dan melindungi kedaulatan NKRI yang tidak dapat dicabut. Untuk itu, Pemerintah Indonesia berupaya mempercepat penyelesaian penetapan zona ekonomi eksklusif lintas perbatasan dengan Vietnam dan mencegah *Illegal Fishing* di perairan Indonesia demi kepentingan nasional Indonesia. Kendala yang dihadapi Indonesia masih dibatasi oleh kurangnya pengawasan dan bakat, dan tumpang tindih wilayah antara Indonesia dan Vietnam belum terselesaikan.

Beberapa hal yang dilakukan oleh Indonesia untuk dapat mencegah IUU *Fishing* ini yaitu dengan melakukan kerja sama bersama dengan Vietnam. Dari sebuah kerja sama itu, timbul lah sebuah perjanjian dimana sebagai bukti dari kerja sama kedua negara ini. Salah satu bukti dari kerjasama yang dilakukan kedua negara ini yaitu adalah dengan berkurangnya kasus IUU *Fishing* di Laut Natuna dan dapat dinyatakan berhasil. Negara Vietnam yang juga semakin dapat menghargai wilayah kedaulatan Laut Indonesia. Indonesia sendiri sudah meratifikasi FAO- *Port State Measurement Agreement* dan membangun pelabuhan-pelabuhan PSMA dan memperkuat perannya sebagai Flag State dan Coastal State.

## 6.2 Saran

Berdasarkan temuan dari penulis, penulis membuat beberapa saran mengenai regulasi dan implikasi kerjasama yang dipimpin oleh pemerintah berupa penghapusan IUU perikanan di Laut Natuna. Singkatnya, Indonesia membutuhkan langkah-langkah yang lebih spesifik untuk memerangi *Illegal Fishing*, seperti meningkatkan jumlah, kapasitas dan peralatan teknis armadanya dengan kapal patroli untuk memantau perairan dan menambah jumlah kapal.

Banyak kapal nelayan yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Juga perlu membangun hubungan kerjasama dengan negara-negara yang mungkin melakukan kegiatan ilegal di kawasan Laut Natuna. Seperti halnya yang menjadi kerangka teoritis yang digunakan oleh penulis yaitu Kerja sama keamanan. Pihak berwenang Indonesia juga perlu mengambil tindakan tegas oleh pihak berwenang Indonesia terhadap pelanggar dan nelayan ilegal di perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan kawasan ini. Ada beberapa tetangga yang tumpang tindih atau *Overlapping* di wilayah ZEE Indonesia. Klaim atau klaim kedaulatan melintasi perbatasan ZEE Laut Natuna. Salah satu stereotip yang diusung pemerintah terhadap bentuk dan pengaruh kerjasama Indonesia dengan negara tetangga yaitu pembentukan dan akses RPOA - IUU oleh Indonesia sangat baik. Perlunya koordinasi semacam ini penting untuk memungkinkan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, untuk mensosialisasikan perbatasan, perikanan dan sanksi

Tasya Milya Salsabila, 2021

*KERJA SAMA INDONESIA DAN VIETNAM UNTUK MENGATASI KASUS ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU) FISHING DI LAUT NATUNA MELALUI REGIONAL PLAN OF ACTION (RPOA) TAHUN 2014 -2020*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id)]

lainnya, terutama ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia kepada nelayan tradisional.